



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1963 TAHUN 2018

TENTANG

**PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu menetapkan Perjanjian Kinerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

20. Peraturan Gubernur Nomor 198 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Menteri Dalam Negeri
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1963 TAHUN 2018
Tanggal 20 Desember 2018

PERJANJIAN KINERJA

UNIT SATUAN KERJA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN : 2018

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	1	Indeks Pembangunan Manusia	80,00
2	Berkurangnya tingkat pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,20%
3	Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat	1	Indeks Ketahanan Pangan	Ketersediaan 100%, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) skor 81
4	Terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat	1	Tingkat Kemiskinan	3,58%
5	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	1	Jumlah titik genangan banjir	12 titik
6	Meningkatnya akses sanitasi layak	1	Cakupan pelayanan air bersih	60,99%
		2	Persentase penurunan volume sampah di kota	14,00%
7	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1	Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (Public Transportation Modal Share)	20%
8	Meningkatnya pertumbuhan investasi	1	Realisasi Nilai Investasi	Rp 93,10 triliun
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	1	Nilai/Predikat AKIP	Predikat A
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,00
		3	Opini Laporan Keuangan Daerah	Predikat WTP
10	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	1	Jumlah kawasan pemukiman kumuh	164 RW

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	32.261.698.568	APBD
2	Program Penataan Administrasi Kependudukan	93.852.082.376	APBD
3	Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik	54.516.911.656	APBD
4	Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	19.093.658.635	APBD
5	Program Penyelenggaraan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	26.905.177.078	APBD
6	Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat	79.682.083.525	APBD
7	Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Pusat	23.922.160.005	APBD
8	Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Selatan	37.963.861.112	APBD
9	Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Timur	53.919.293.332	APBD
10	Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Utara	65.181.239.628	APBD
11	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	389.087.909.203	APBD
12	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara	422.741.820.708	APBD
13	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	520.312.310.046	APBD
14	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	556.060.723.223	APBD
15	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur	636.749.607.796	APBD
16	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	58.643.076.685	APBD
17	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah	108.736.588.145	APBD
18	Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	2.160.531.133	APBD
19	Program pembinaan dan Pengembangan BUMD	3.339.197.500	APBD
20	Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah	82.258.934.774	APBD
21	Program Pemanfaatan Aset Daerah	171.400.000	APBD
22	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	16.328.994.944	APBD
23	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	45.401.601.965	APBD
24	Program Pengembangan Pertanian, peternakan dan kesehatan hewan	100.099.349.977	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
25	Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan	99.317.123.802	APBD
26	Program Peningkatan Penanaman Modal	3.715.714.306	APBD
27	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	120.247.475.933	APBD
28	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum	151.534.900.949	APBD
29	Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan	68.245.012.736	APBD
30	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan	129.873.745.372	APBD
31	Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja	49.016.169.892	APBD
32	Program Penciptaan Hubungan Industrial yang harmonis	781.000.000	APBD
33	Program Pengelolaan Pemakaman	542.683.405.875	APBD
34	Program Pengelolaan Persampahan	1.495.200.950.825	APBD
35	Program Penataan Kawasan Permukiman	189.915.421.563	APBD
36	Program Pelayanan Penghuni Rumah Susun	23.522.325.599	APBD
37	Program Pengendalian Banjir	4.080.620.962.180	APBD
38	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air bersih	119.465.338.796	APBD
39	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan	1.570.149.056.701	APBD
40	Program Pengelolaan, Pengawasan dan Pembinaan Mental Spiritual	8.257.983.964	APBD
41	Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	32.848.568.995	APBD
42	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	1.471.031.285.505	APBD
43	Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah	1.682.376.526.000	APBD
44	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	30.256.510.161	APBD
45	Program Pemberdayaan Masyarakat	12.125.741.475	APBD
46	Program Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Pramuka	22.049.237.117	APBD
47	Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga	462.708.951.554	APBD
48	Program Wajib Belajar 12 Tahun	2.674.633.896.068	APBD
49	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	38.649.139.183	APBD
50	Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan	1.048.992.570.150	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
51	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	2.216.428.075.458	APBD
52	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	10.809.073.800	APBD
53	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	13.350.953.801	APBD
54	Program Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan	104.555.105.998	APBD
55	Program Pelayanan dan Pengembangan Kearsipan	39.435.694.948	APBD
56	Program Penanganan Fakir Miskin	6.600.079.744	APBD



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN